



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PERAN STRATEGIS PELNI DALAM MENINGKATKAN MOBILITAS MELALUI DISKON TARIF

**Rizky Allam Zandriyan Pratama**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[rizky.pratama2@dpr.go.id](mailto:rizky.pratama2@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Lonjakan penumpang kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni selama liburan sekolah 2025 menjadi sorotan publik, setelah pemerintah bersama Pelni meluncurkan program diskon tarif tiket hingga 50 persen. Program diskon tarif ini berlaku secara nasional untuk seluruh rute dan kelas kapal penumpang Pelni, terhitung sejak 5 Juni hingga 31 Juli 2025, bertepatan dengan musim libur sekolah dan Iduladha. Hanya dalam 15 hari pelaksanaan, kuota subsidi telah terserap sebesar 40 persen, dengan penjualan tiket melonjak hingga 310 ribu, angka yang jauh di atas periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah, Pelni memainkan peran strategis dalam mendukung mobilitas nasional dan sekaligus berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi.

Penerapan kebijakan diskon tarif ini memberikan berbagai dampak positif, baik bagi Pelni sebagai perusahaan BUMN maupun bagi masyarakat luas. Bagi Pelni, peningkatan jumlah penumpang memperjelas posisi strategis perusahaan dalam mendukung pemerataan akses transportasi dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Peningkatan volume penumpang juga berpotensi meningkatkan pendapatan non-tarif, seperti jasa pengangkutan dan layanan pengiriman barang, serta penyediaan konsumsi di atas kapal, sekaligus memperluas basis pelanggan setia di masa mendatang. Citra Pelni sebagai BUMN yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat pun semakin positif sekaligus membuktikan komitmennya dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal.

Bagi masyarakat, diskon tarif memberikan akses transportasi laut yang lebih terjangkau, terutama bagi keluarga, pelajar, dan pekerja musiman, sehingga memudahkan mobilitas untuk keperluan wisata, mudik, maupun kunjungan keluarga dengan biaya yang lebih ringan. Program ini juga membantu memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya di daerah kepulauan yang sangat bergantung pada moda transportasi laut.

Selain manfaat langsung, program diskon tarif berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, konsumsi lokal dan sektor pariwisata di wilayah tujuan, sekaligus memberikan keuntungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pelabuhan dan destinasi wisata. Stimulus ekonomi seperti ini menjadi bukti nyata kontribusi BUMN dalam mendukung program pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi. Namun, lonjakan penumpang juga menimbulkan sejumlah tantangan dan potensi dampak negatif. Dari sisi operasional, Pelni harus memastikan bahwa aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan tetap menjadi prioritas utama di tengah peningkatan jumlah penumpang. Risiko kepadatan berlebih (*overcrowding*) di kapal berisiko terhadap keselamatan pelayaran dan kualitas layanan. Selain itu, sebagai BUMN yang mengemban misi pelayanan publik, Pelni harus mampu menjaga keseimbangan antara aspek komersial dan sosial, agar pelaksanaan program diskon tarif tidak menimbulkan beban keuangan jangka panjang baik bagi perusahaan maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Komisi VI DPR RI perlu memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan pelaksanaan program diskon tarif ini. Pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan kapasitas kapal tidak melebihi batas aman, serta mencegah praktik penjualan tiket ilegal atau penyalahgunaan kuota subsidi. Selain itu, penting bagi Komisi VI DPR RI untuk memastikan bahwa stimulus ekonomi ini benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya bagi spekulasi atau pelaku usaha tertentu.

Selanjutnya, Komisi VI DPR RI juga perlu mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi efektivitas program diskon tarif ini secara menyeluruh. Evaluasi tersebut penting untuk menilai dampak jangka panjang terhadap keuangan Pelni sebagai BUMN, serta implikasinya terhadap perekonomian nasional dan daerah. Jika terbukti efektif, program serupa dapat dijadikan model kebijakan transportasi publik berbasis subsidi yang terarah pada momentum-momentum tertentu, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

## Atensi DPR

Selama periode libur sekolah 2025, jumlah penumpang kapal PT Pelni mengalami peningkatan setelah pemerintah meluncurkan program diskon tarif hingga 50 persen. Program ini membawa dampak positif, seperti meningkatnya akses transportasi laut, mendukung pemerataan ekonomi, dan menggerakkan sektor pariwisata serta UMKM di daerah tujuan. Bagi Pelni, kebijakan ini juga memberikan nilai strategis melalui peningkatan pendapatan dan citra perusahaan sebagai BUMN yang responsif terhadap kebutuhan publik. Namun, lonjakan penumpang turut menimbulkan tantangan, seperti risiko keselamatan pelayaran akibat kepadatan dan potensi tekanan keuangan jangka panjang. Dalam hal ini, Komisi VI DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya perlu memastikan pelaksanaan program berjalan aman, subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Selain itu, Pemerintah perlu didorong untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan bahwa kebijakan ini dapat dikembangkan sebagai model subsidi transportasi publik yang berkelanjutan, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.

## Sumber

antaranews.com, 20 dan 23 Juni 2025;  
kompas.com, 20, 23 Juni 2025;  
suara.com, 5 Juni 2025;  
tempo.co, 23 Juni 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*